

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA ALAM DI KINTAMANI (Studi Kasus Kawasan Batur Geopark)

Putu Pingky Ananda Putri¹⁾, Putu Nomy Yasintha²⁾, I Ketut Winaya³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: pingkyananda0204@gmail.com¹⁾, putu_nomy@unud.ac.id²⁾, ketutwinaya14@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

Batur Geopark is attribution to an innovative approach that blends the preservation of geoscience reserves with sustainable development, under a government regulatory framework. The Batur Geopark area consists of a core village of 15 villages, and supporting villages of 33 villages. Several areas in the core village area are the center spots for tourist attractions that are frequently visited, such as Mount Batur, Black Lava, Lake Batur, Terunyan Village, Mount Batur Museum, Ulun Danu Batur Temple, hot springs, Mount Abang, Pinggan sunrise spot, and many more. Recently, there have been many developments of new tourist destinations that are increasingly attracting the attention of tourists to come to visit. Of course, the government cannot achieve this tourism development alone, but requires collaboration between the community, the private sector and the government itself. Collaboration carried out in tourism development is said to be collaborative governance. This study aims to find out how collaborative governance forms in the development of natural tourism objects in Kintamani (Case Study of the Batur Geopark Area). In this study the authors used a type of qualitative research with descriptive methods. The analysis in this study uses collaborative governance success measurement theory. The results of the research findings indicate that the collaboration between the government, the private sector, and the community has been going quite well, but there are several problems such as the domination of the government, there is still one party, namely the Batur UNESCO Global Geopark Manager who does not yet have authority, there is one party who do not have the responsibility but still able to coordinate with other parties well. As for recommendations that can be given, namely from the community, especially POKDARWIS, informing information or coordinating with the village, and parties involved in the collaboration to provide more understanding to the community outside of POKDARWIS members regarding the collaboration carried out, the positive impacts obtained, and the benefits for the community.

Keywords: Collaborative Governance, Tourism, Tourism Object Development

1. PENDAHULUAN

Collaborative governance merupakan perspektif yang muncul sebagai startegi baru dengan mengajak berbagai pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Holzer dalam

Arrozaaq (2016) berpendapat bahwa *collaborative governance* adalah upaya pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta yang diperuntukkan untuk masyarakat. *Collaborative governance*

juga dapat menggambarkan situasi saling terikat antar *stakeholder*, serta merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan publik maupun tujuan yang hendak dicapai. Dimana dalam upaya menyelesaikan masalah tersebut pemerintah perlu melakukan kerjasama dengan pelaku ataupun lembaga non pemerintah baik itu pihak swasta, masyarakat maupun yang lainnya, Sudarmo dan Mutiarawati (2017). Banyak alasan yang menjadi latar belakang adanya kolaborasi tiap institusi maupun lembaga, Sambodo (2016). Dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh suatu lembaga pemerintah maupun swasta serta masyarakat yang saling terikat guna menyelesaikan permasalahan yang ada serta untuk mencapai tujuan bersama. Reformasi sangat diperlukan dalam proses *collaborative governance*, yaitu dengan menyatukan berbagai pemikiran dari *stakeholders*, lebih dekat dengan masyarakat, menjalin kerjasama yang lebih luas dengan berbagai pihak agar terpenuhinya kebutuhan sumber daya dan untuk merekrut sumber daya manusia dalam pengembangan pariwisata.

Pariwisata menjadi salah satu zona terbanyak dalam menyumbang pemasukan untuk negara terlebih lagi untuk pemerintah daerah. Bersumber pada Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dapat dipahami bahwa pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pariwisata di Indonesia pun menjadi salah satu zona tercepat dalam meningkatkan laju perkembangan ekonomi.

Indonesia mempunyai banyak sekali jenis darmawisata yang bisa menarik atensi wisatawan asing untuk berkunjung, seperti darmawisata alam, sejarah, budaya, maupun yang lainnya sehingga menarik untuk didatangi. Ismayanti dalam Pamularsih (2021) yang menggolongkan pariwisata menjadi beberapa bagian berdasarkan jenisnya, seperti darmawisata alam, sejarah, budaya, maupun yang lainnya. Terdapatnya pariwisata pula akan memunculkan dampak yang baik untuk warga lokal yang tinggal di dekat destinasi darmawisata, yaitu dapat memberikan lapangan pekerjaan sehingga berpotensi dalam meningkatkan kesejahteraan ataupun perekonomian. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata sangat penting untuk dilaksanakan agar dapat menolong, mendukung, serta meningkatkan perekonomian.

Pengembangan pariwisata di tiap-tiap daerah sedang gencar-gencarnya dilakukan pada saat ini, tentunya menyesuaikan dengan potensi yang dimilikinya. Salah satu bagian dari pembangunan ekonomi yaitu pengembangan pariwisata. Upaya untuk meningkatkan atau memenuhi pelayanan dan fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat dapat diartikan sebagai pengembangan pariwisata, Pearce dalam Pamularsih (2021). Tujuan dari pengembangan kawasan pariwisata ini adalah untuk menaikkan atensi dan kuantitas kunjungan wisatawan ke suatu daerah yang akan dikembangkan agar nantinya dapat memberikan kepuasan kepada wisatawan yang berkunjung, James dalam Wiratmika, dkk (2021). Sehingga ketika banyak wisatawan yang datang berkunjung, maka masyarakat juga akan merasakan dampaknya seperti adanya lapangan pekerjaan, tambahan

penghasilan, peluang untuk berbisnis, maupun dampak positif lainnya.

Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia yang kunjungan wisatawan mancanegaranya sangat tinggi, hal tersebut disebabkan karena memiliki daya tarik tersendiri untuk dikunjungi. Bali begitu kental dengan budaya serta adat istiadat yang sangat dijaga kelestariannya. Selain wisata budaya, Bali juga memiliki keindahan alam begitu mempesona yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung, seperti pantai, danau, gunung, hutan, persawahan, dan lain sebagainya. Salah satu tempat di Bali yang marak didatangi wisatawan asing yaitu Kintamani tepatnya di kawasan Batur Geopark, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Geopark merupakan penobatan kepada inovasi pendekatan yang berbaur antara pelestarian cadangan ilmu bumi dengan pembangunan berkepanjangan, dibawah kerangka peraturan pemerintah.

Kawasan Batur *Geopark* ini terletak pada ketinggian 1.000 mdpl hingga 2.172 mdpl (baturglobalgeopark.com). Disini para wisatawan asing akan disajikan oleh panorama alam gunung dan Danau Batur, serta dapat menikmati panorama alam 3 gunung sekaligus, yaitu Gunung Agung, Gunung Abang, serta Gunung Batur itu sendiri dengan gradasi karakteristik khas Kintamani yaitu hawa sejuknya yang memiliki suhu pada umumnya antara 15-21 derajat celcius. Wilayah Batur UNESCO Global Geopark memiliki suatu kawasan khusus di dalamnya, yakni Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani. Selain itu, di dalam Geopark juga terdapat kawasan konservasi yakni Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang dan

Taman Wisata Alam Panelokan yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kawasan Batur *Geopark* ini terdiri dari desa inti yang berjumlah 15 desa, dan desa penunjang yang terdiri dari 33 desa. Wilayah desa inti ini merupakan wilayah dominan tempat wisata yang ada di Batur *Geopark*, yang terdiri dari Desa Sukawana, Desa Kintamani, Desa Pinggan, Desa Belandingan, Desa Songan A, Desa Songan B, Desa Terunyan, Desa Suter, Desa Abangsongan, Desa Abangbatuinding, Desa Buahon, Desa Kedisan, Desa Batur Tengah, Desa Batur Selatan, dan Desa Batur Utara.

Beberapa wilayah di kawasan desa inti ini menjadi *spot centre* tempat wisata yang sering dikunjungi, seperti Gunung Batur, *Black Lava*, Danau Batur, Desa Terunyan, Museum Gunung Batur, Pura Ulun Danu Batur, pemandian air panas, Gunung Abang, Pinggan sunrise spot, dan masih banyak lagi. Belakangan ini, ada banyak sekali pengembangan destinasi wisata baru yang semakin menarik perhatian wisatawan untuk datang berkunjung. Seperti yang saat ini tengah ramai di kalangan wisatawan, yaitu Jeep tour yang dapat mengajak wisatawan mengelilingi *black lava*, melihat matahari terbit dan keindahan alam di sekitar Gunung Batur. Selain itu, wisatawan yang hendak bermalam di kawasan Kintamani juga disediakan banyak sekali tempat camp maupun tempat menginap lainnya. Keberadaan *coffee shop* juga sangat banyak tersedia di sepanjang jalan utama, tepatnya di wilayah Penelokan yang dimana wisatawan dapat menikmati keindahan Gunung Batur beserta danau dan keindahan

alam di sekitarnya dibarengi dengan menikmati makanan dan minuman yang tersedia di *coffee shop* tersebut. Bahkan sampai saat ini masih banyak pengembangan wisata melalui pembangunan-pembangunan tempat wisata baru yang ditujukan untuk dapat menarik perhatian wisatawan. Pembangunan, pengelolaan, maupun pengembangan pariwisata tersebut tentunya berdasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019-2025 yang di dasari oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 Tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada satuan Pengelolaan Hutan karena pengembangan pariwisata tersebut berada di kawasan konservasi. Adapun data kunjungan wisatawan baik domestik maupun manca negara selama 5 tahun terakhir di wilayah Kabupaten Bangli, yaitu:

Tabel 1.2 Data Kunjungan Wisatawan Kabupaten Bangli

Data Kunjungan Wisatawan ke Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Bangli						
No	Tahun	Batur	Pengelipuran	Kehen	Penulisan	Trunyan
1	2017	542.724	209.267	25.953	1.012	11.866
2	2018	425.493	242.686	25.991	949	9.363
3	2019	941.410	261.161	19.404	1.046	8.871
4	2020	155.394	35.541	1.923	105	1.482
5	2021	22.517	146.745	0	67	884

(sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangli)

Data tersebut memperlihatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bangli selalu mengalami perubahan, berupa peningkatan maupun penurunan jumlah kunjungan. Tiap tahunnya, kawasan wisata di Batur Kintamani memiliki jumlah kunjungan paling banyak diantara tempat wisata yang lainnya. Akan tetapi, kawasan wisata Penulisan dan Trunyan yang juga berada di Kintamani memiliki jumlah kunjungan yang lebih sedikit dibandingkan dengan Desa

Wisata Pengelipuran. Selain itu, sesuai dengan data tersebut pada tahun 2021 Batur juga mengalami penurunan jumlah wisatawan dan dikalahkan oleh Desa Wisata Pengelipuran.

Pengembangan wisata ini tentunya tidak dapat dicapai sendiri oleh pemerintah, melainkan membutuhkan sebuah kolaborasi antara masyarakat, pihak swasta maupun dari pihak pemerintah itu sendiri. Kolaborasi yang dilakukan dalam pengembangan pariwisata ini dikatakan sebagai *collaborative governance*. Menurut Ansel & Gash dalam (Putra & Widhiasthini, 2022) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai bentuk tatanan pemerintahan, terdiri lebih dari satu lembaga publik yang berhubungan langsung dengan aktor swasta dalam mengambil keputusan formal, berorientasi pada kesepakatan yang mencerminkan secara mendalam dan mengarah pada perumusan atau pelaksanaan kebijakan publik dan juga manajemen program atau asset publik. Sehingga nantinya suatu keputusan yang hendak disepakati bersama antar stakeholders dalam konteks pengembangan pariwisata di kawasan Batur Geopark.

Sesuai dengan Rancangan Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPDA), bahwasannya pemerintah dalam mengembangkan pariwisata tidak bisa hanya dengan berdiri sendiri, melainkan perlu adanya peran dari stakholder lainnya. Kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah pengelolaan tempat wisata yang berada di kawasan Batur *Geopark*. Kerjasama yang dilakukan tersebut berdasarkan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017

Tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan. Pemerintah sebagai pemilik beberapa tempat wisata yang ada di kawasan Batur *Geopark*, bekerjasama dengan komunitas atau kelompok masyarakat untuk membantu mengelola tempat-tempat wisata tersebut, seperti contohnya dalam hal *ticketing*. Pemerintah disini sebagai penentu harga dan penyedia sarana prasarana, selanjutnya kelompok masyarakat atau kelompok sadar wisata yang diberikan kewenangan untuk mengelolanya. Sementara itu, masyarakat juga menjalin kerjasama dengan pihak swasta seperti perseroan yang bergerak di bidang industri pariwisata untuk melakukan promosi tempat wisata tersebut. Selain itu, pada tahun 2017 pemerintah juga telah bekerjasama dengan BKSDA dalam rangka penguatan fungsi Taman Wisata Alam (TWA) Panelokan dan TWA Gunung Batur Bukit Payang.

Pengembangan pariwisata ini tentunya tidak berjalan mulus begitu saja, melainkan masih terdapat permasalahan yang dihadapi, yaitu kawasan wisata Kintamani bukan kawasan inklusif atau dapat dikatakan sebagai kawasan terbuka. Dalam hal ini, penduduk dan petugas setempat masih berbaur dengan para wisatawan sehingga sangat sulit dibedakan mana yang berkunjung dan mana yang tidak berkunjung, hal ini juga karena banyaknya akses atau jalan masuk menuju Kintamani. Selain itu, permasalahan sampah juga sangat banyak ditemui sehingga menyebabkan pencemaran, terutama di kawasan Danau Batur, aktivitas tambang atau galian c yang masih dilakukan, serta permasalahan yang akhir-akhir ini terjadi adalah pembangunan yang tidak terkendali, dimana pemilik lahan

melakukan pembangunan seenaknya tanpa memperhatikan struktur lahan.

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya peran *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata ini. Hal ini banyaknya kewenangan yang ada di dalam Batur *Geopark*, yang mengakibatkan banyak *stakeholder* yang terlibat di dalamnya terutama dari pemerintah itu sendiri. Selain itu juga karena banyak klaster maupun tempat wisata yang sudah dikelola secara mandiri-mandiri. Salah satunya adalah objek wisata *black lava* yang merupakan kawasan konservasi, akan tetapi sekarang masyarakat membuat komunitas berupa *jeep tour* untuk mengelilingi *black lava*, bahkan mengelilingi Gunung Batur sampai Pinggan *sunrise spot*. Akan tetapi, dari pihak pemerintah tidak sepenuhnya mengizinkan terkait trip di *black lava* tersebut karena itu merupakan kawasan konservasi. Akan tetapi, pada saat ini banyak wisatawan yang tertarik dan datang kesana dengan menaiki kendaraan trip atau *jeep tour* tersebut. Jika dibiarkan begitu saja maka hal tersebut akan menyebabkan keadaan di kawasan *black lava* tersebut menjadi rusak. Dimana seharusnya antar *stakeholders* memiliki peran, tanggung jawab serta tujuan yang sama baik dalam mengembangkan dan juga menjaga keindahan alam di Kintamani. Kemudian ada juga permasalahan penggunaan lahan tanpa izin oleh masyarakat yang berada di sekitar kawasan konservasi, yang digunakan sebagai lahan pertanian, berjualan, dan lain sebagainya. Serta permasalahan yang terakhir adalah kurangnya modal maupun pendanaan yang dimiliki oleh salah satu pihak menyebabkan perlunya diadakan sebuah kemitraan ataupun kerjasama untuk membantu pengembangan objek wisata

tersebut. Hal tersebut juga diakibatkan oleh kurangnya pemahaman dan informasi yang di dapat oleh masyarakat terkait dengan perlindungan kawasan konservasi. Oleh sebab itu, *collaborative governance* ini perlu dilakukan. Selain untuk membantu mengembangkan pariwisata alam di Kintamani dengan promosi melalui media masa dan membentuk badan promosi wisata sehingga nantinya dapat menambah pemasukan atau retribusi bagi daerah, juga untuk mengedukasi masyarakat maupun wisatawan untuk tetap menjaga keasrian dan kebersihan lingkungan di tempat wisata terlebih lagi dalam pengelolaan kawasan hutan ataupun kawasan konservasi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat kajian tentang “**Collaborative Governance dalam Pengembangan Objek Wisata Alam di Kintamani (Studi Kasus Kawasan Batur Geopark)**”.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* menurut Deseve dalam Sudarmo (2011) yang terdiri dari delapan indikator sebagai berikut:

a. *Networked Structure*

Indikator *networked structure* disini merupakan keadaan dimana terdapat keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya yang menggambarkan unsur fisik dari jaringan yang ditangani.

b. *Governance*

Governance diartikan sebagai tata kelola dalam kolaborasi. Keberhasilan indikator

governance dapat dilihat melalui beberapa unsur; *boundary&exclusivity*, *rules*, *self determination* dan *network management*.

c. *Commitment to a Common Purpose*

Indikator ini menjadi alasan utama dari suatu jaringan. Komitmen dan tujuan ini dilakukan secara bersama, serta tidak boleh memihak salah satu *stakeholders* atau pemangku kepentingan.

d. *Trust Among the Participants*

Indikator ini merupakan hubungan profesional dimana para partisipants memberikan kepercayaannya mengenai informasi untuk mencapai tujuan bersama.

e. *Access to Authority*

Merupakan prosedur yang jelas serta dapat diterima secara luas oleh seluruh *stakeholders* yang terlibat.

f. *Distributive Accountability/Responsibility*

Indikator ini merupakan manajemen yang dilakukan oleh *stakeholders* kepada seluruh anggota untuk mencapai tujuan bersama.

g. *Information Sharing*

Indikator *information sharing* merupakan keluasan akses bagi para anggota, dan terbatas bagi yang bukan anggota.

h. *Access to Resources*

Ketersediaan sumber daya manusia, teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan dalam mencapai tujuan *network*.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam

penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu sebagai stakeholder dalam pelaksanaan pengembangan objek wisata alam di Kintamani (Studi Kasus Kawasan Batur Geopark). Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (verifikasi).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil Temuan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun hasil analisis *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Objek Wisata Alam di Kintamani (Studi Kasus Kawasan Batur Geopark) yang diukur berdasarkan indikator keberhasilan *collaborative governance* adalah sebagai berikut:

a) *Networked Structure*

Dalam pengembangan objek wisata alam di Kintamani ada banyak pihak yang terdapat di dalamnya mulai dari Pemerintah yaitu BKSDA, Dinas Pariwisata Kabupaten Bangli, kemudian Pengelola Batur *UNESCO Global Geopark*, pihak Swasta yakni PT Tanaya, dan pihak masyarakat yaitu Kelompok Sadar Wisata. Setiap *stakeholder* memiliki peran yang berbeda-beda, akan tetapi peran dari setiap *stakeholders* tersebut dapat dikelompokkan sesuai dengan jenis atau kesamaan perannya. Peran dari pemerintah khususnya BKSDA dalam hal ini sangat

dominan jika dibandingkan dengan pihak lainnya. Meskipun kolaborasi ini berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangli, akan tetapi kawasan Taman Wisata Alam yang berada di dalam *Geopark* merupakan kewenangan dari pemerintah pusat yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memberikan kewenangan kepada BKSDA untuk mengelolanya. Berdasarkan analisis temuan di atas, indikator *Network Structure* yang terdapat dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam pengembangan objek wisata alam di Kintamani belum terlaksana secara optimal, karena masih adanya dominasi salah satu pihak.

b) *Commitment to a Common Purpose*

Dalam kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah baik BKSDA dan Pemerintah Kabupaten Bangli yang disini sebagai Dinas Pariwisata, pihak swasta yaitu PT Tanaya, pihak masyarakat yakni kelompok sadar wisata walaupun memiliki posisi dan peran yang berbeda, namun secara garis besar mereka memiliki tujuan yang sama dimana mereka ingin mengembangkan objek wisata alam yang ada di Kintamani serta melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok sadar wisata. Masyarakat yang dimaksud tersebut adalah masyarakat yang berada di kawasan objek wisata khususnya dan juga masyarakat secara umum.

Dalam mencapai tujuan tersebut tentu didasarkan pada komitmen yang kuat antar stakeholder yang terlibat. Oleh pihak pemerintah, komitmen yang dimaksud adalah komitmen yang telah disepakati bersama di dalam perjanjian kerjasama yang telah dibuat. Sementara itu, komitmen yang dimaksud oleh pihak swasta adalah komitmen untuk hasil yang

diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Berdasarkan hasil temuan tersebut, komitmen yang dimiliki oleh stakeholder yang terlibat sudah cukup baik, komitmen yang dimaksudkan adalah sesuai dengan isi dari perjanjian kerjasama yang telah disepakati serta komitmen untuk hasil dari kerjasama tersebut dapat dimanfaatkan secara bersama. Sehingga hal tersebut sudah sesuai dengan indikator *commitment to a common purpose* yaitu adanya komitmen dari seluruh *stakeholder* yang terlibat untuk mencapai tujuan dari kolaborasi.

c) Trust Among the Participants

Pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengembangan objek wisata alam di Kintamani perlu adanya kepercayaan antar semua pihak yang terlibat dalam menunjang keberhasilan kolaborasi yang dibangun. Dalam membangun rasa kepercayaan ini berbagai upaya telah dilakukan oleh antar *stakeholders* seperti dari pihak yang dalam hal ini adalah BKSDA selain lebih menekankan pada norma atau peraturan, juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan konservasi. Hal tersebut bertujuan untuk memperjelas dan membuat masyarakat menjadi semakin yakin tentang pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

Kemudian dari pihak swasta yakni PT Tanaya yaitu dengan melakukan pendekatan secara persuasif. Yaitu dengan melakukan komunikasi dengan memberikan pemaparan dan pengertian kepada masyarakat terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan untuk perkembangan pariwisata maupun pertanian. Dari masyarakat tentunya mempercayakan penuh terkait pelaksanaan kolaborasi dalam pengembangan objek wisata

alam tersebut baik itu terhadap pihak pemerintah maupun pihak swasta yang terlibat. Berdasarkan hasil temuan tersebut dapat dilihat bahwa kepercayaan sudah terbangun antar *stakeholder* yang terlibat baik dari pemerintah, swasta, serta masyarakat. Kepercayaan ini muncul karena adanya komunikasi yang baik antar *stakeholder* dan dapat bermanfaat untuk semua. Sehingga melalui hal ini dapat diketahui bahwa indikator *Trust Among the Participants* yaitu adanya kepercayaan antar *stakeholders* yang terlibat dalam kolaborasi sudah berjalan dengan baik dalam pelaksanaan pengembangan objek wisata alam di Kintamani.

d) Governance

Kolaborasi yang dilakukan antara pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan objek wisata alam di Kintamani telah memiliki izin, peraturan, ataupun dokumen tertulis yang menyatakan mengenai batasan antar pihak yang terlibat dalam kolaborasi tersebut. Serta setiap *stakeholder* yang terlibat di dalamnya telah memiliki peran untuk manajemen kerjasama maupun kolaborasi yang dilakukan.

Dalam kolaborasi tersebut, pihak-pihak yang terlibat telah memiliki izin maupun pedoman dalam pengelolaan, pemanfaatan, penguatan suatu kawasan yang juga digunakan sebagai objek wisata alam. Seperti perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh sesama *government* yaitu Kepala Balai Konservasi Sumber Daya alam dengan Bupati Bangli. Selain itu juga terdapat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk pihak swasta yakni PT Tanaya Pesona Batur. Dapat dikatakan bahwa indikator *Governance* yaitu batasan partisipan yang terlibat, aturan

mengenai batasan tindakan atau perilaku pada *stakeholders* yang ada di dalamnya, kebebasan bagaimana kolaborasi harus dijalankan, manajemen jaringan, alokasi sumber daya, dan kontrol kualitas dalam pengembangan objek wisata alam di Kintamani sudah berjalan dengan Baik.

e) Access to Authority

Kewenangan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi berkaitan dengan pengembangan objek wisata alam di Kintamani dijalankan sesuai dengan tupoksi dan posisi masing-masing. Dimana tidak hanya dari pemerintah daerah saja, melainkan terdapat kewenangan dari pemerintah pusat yakni BKSDA. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat yaitu menilai dan memberikan izin kepada pihak-pihak yang hendak melakukan kerjasama dalam hal pengelolaan kawasan konservasi atau taman wisata alam yang nantinya dikembangkan menjadi objek wisata alam. Sementara itu, dari pemerintah daerah sendiri memiliki wewenang untuk mengatur dan menata wilayah yang memang menjadi tanggung jawabnya. Seperti misalnya membangun sarana prasarana penunjang pariwisata, dan memungut memungut retribusi. Pengelola Batur *UNESCO Global Geopark* karena baru terbentuk, untuk saat ini belum memiliki kewenangan dalam pengelolaan ataupun pengembangan kawasan.

Kemudian dari pihak swasta yakni PT Tanaya memiliki wewenang untuk mengelola dan mengembangkan kawasan sesuai dengan izin yang telah disepakati. Sehingga dalam pembangunan kawasan wisata sesuai dengan ukuran yang telah disepakati dan tanpa merusak keindahan alam. Selain dari pihak pemerintah dan swasta, masyarakat yang

dalam hal ini adalah kelompok sadar wisata juga memiliki wewenang untuk mengelola objek wisata alam yang berada di kawasan konservasi. Pengelolaan tersebut telah berdasarkan izin dan perjanjian kerjasama dengan pihak pemerintah yakni BKSDA. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, indikator *Access to Authority* yaitu ketersediaan ukuran atau ketentuan prosedur yang jelas serta dapat diterima secara luas. Dapat dikatakan bahwa belum semua pihak memiliki aturan kewenangan yang jelas dalam menjalankan perannya.

**f) Distributive Accountability/
Responsibility**

Berkaitan dengan kolaborasi dalam pengembangan objek wisata alam di Kintamani, tanggung jawab *stakeholders* telah dilaksanakan dengan baik dan juga berpedoman atas Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati. Walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat pihak yang belum memiliki tanggung jawab karena baru dibentuk, akan tetapi selebihnya telah berjalan dengan baik.

Tanggung jawab yang dilajankan tersebut juga sesuai dengan struktur kepengurusan baik pemerintah, swasta, serta masyarakat itu sendiri. Yang dimana tiap-tiap pihak juga memiliki pertanggung jawaban kepada Berdasarkan hasil temuan tersebut, indikator *Distributive Accountability/Responsibility* yang merujuk pada tanggung jawab, penataan, pengelolaan dan manajemen yang dilakukan secara bersama sebagian besar telah berjalan dengan baik. Akan tetapi terdapat salah satu pihak yang belum memiliki tanggung jawab, namun tetap dapat

berkoordinasi dengan pihak lainnya dengan baik. a masing-masing atasannya.

g) Information Sharing

Kemudahan dalam mengakses informasi dalam kolaborasi antara BKSDA, Dinas Pariwisata, Pengelola Batur *UNESCO Global Geopark*, PT Tanaya, masyarakat yakni kelompok sadar wisata, keseluruhan pihak tersebut selalu memberikan dan mendapatkan informasi mengenai kolaborasi serta kegiatan yang dijalankan. Hal ini sebagai bentuk transparansi antar seluruh pihak yang terlibat di dalam kolaborasi sehingga mengarah kepada tingkat kepercayaan antar stakeholder tersebut. Baik dari pihak swasta dan POKDARWIS selalu memberikan informasi mengenai rencana kegiatan, perkembangan dan kendala antar sesama mereka dan juga kepada pemerintah. Sementara itu dari pihak pemerintah juga selalu mendapat informasi, baik itu BKSDA, dinas pariwisata maupun Pengelola Batur *UNESCO Global Geopark* juga mendapatkannya. Berdasarkan hasil temuan tersebut, dapat dilihat bahwa kemudahan akses informasi antar *stakeholder* yang terlibat sudah sepenuhnya terbuka.

h) Access to Resources

Kejelasan dari ketersediaan sumber daya bagi setiap *stakeholders* yang terlibat merupakan hal wajib dalam menjalankan kolaborasi. Pada pelaksanaan pengembangan objek wisata alam di Kintamani yang dalam hal ini studi kasus yakni kawasan Batur *Geopark* seluruh pihak yang terlibat dalam kolaborasi telah memberikan beragam sumber daya untuk mendukung pengembangan objek wisata alam di Kintamani tersebut. Dari pihak pemerintah telah memberikan akses atau izin mengelola

kawasan yang memang diperuntukkan untuk kawasan pariwisata. Selain itu juga pemerintah telah memberikan sarana maupun prasarana penunjang pengembangan objek wisata tersebut, seperti fasilitas umum. Dari pihak swasta yakni PT Tanaya adalah memberikan bantuan keuangan dan juga lapangan pekerjaan kepada masyarakat setempat khususnya yang berbasis *non skill*. Dari masyarakat dalam hal ini adalah POKDARWIS yang juga telah memberikan sumber daya yakni berupa jasa dalam mengelola dan mengembangkan objek wisata alam tersebut. Dimana untuk saat ini telah bekerja sama dengan pihak swasta untuk dapat lebih mengembangkan objek wisata alam tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator *Access to Resources* telah berjalan dengan baik, seluruh pihak yang terlibat dalam kolaborasi pengembangan objek wisata alam telah memberikan bantuan sumber daya baik lahan, pendanaan, sarana prasarana penunjang, sumber daya manusia, serta sumber daya yang lainnya.

Rekomendasi

Dalam menjalankan kolaborasi pengembangan objek wisata alam di Kintamani tersebut, tentu diperlukan adanya langkah-langkah yang harus dilakukan agar dapat mencapai tujuan. Oleh sebab itu penulis bermaksud memberikan rekomendasi yang dapat dilakukan agar nantinya pelaksanaan pengembangan objek wisata alam di Kintamani semakin optimal. Adapun rekomendasi yang dapat penulis berikan, yaitu:

1. Pihak yang terlibat dalam kolaborasi, khususnya masyarakat dari POKDARWIS

agar memberitahukan informasi ataupun berkoordinasi secara langsung kepada Kepala Desa ataupun pihak desa yang lainnya mengenai kolaborasi pengembangan objek wisata alam yang dilakukan tersebut agar pihak desa mengetahui sedikit tidaknya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakatnya dan kegiatan yang ada di daerahnya.

2. *Stakeholders* yang terlibat dalam kolaborasi baik itu dari pihak pemerintah, swasta, maupun masyarakat yang dalam hal ini yaitu Kelompok Sadar Wisata agar memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat di luar anggota POKDARWIS terkait dengan kolaborasi yang dilakukan, dampak positif yang akan didapatkan, keuntungan bagi masyarakat khususnya yang berada di kawasan tersebut agar tidak ada selisih paham yang terjadi dan kolaborasi dapat berjalan dengan baik.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Dari 8 indikator, 5 indikator telah berjalan dengan baik yaitu indikator *commitment to a common purpose, trust among the participants, governance, information sharing, access to resources* dan 3 indikator yang belum berjalan dengan baik yaitu *indikator network structure, access to authority, serta distributive accountability/responsibility*.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat penulis berikan untuk menguatkan kolaborasi dalam Pengembangan Objek Wisata Alam di Kintamani adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar *stakeholder* yang terlibat guna

mencegah dominasi oleh salah satu pihak, agar nantinya kolaborasi dapat berjalan dengan baik dan optimal.

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat baik itu dari pihak pemerintah, swasta, serta masyarakat dalam membantu pengembangan objek wisata alam di Kintamani.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 Tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan

Sumber Jurnal atau Penelitian

I Ketut Winaya, P. A. (2014). Peranan E-Government Dalam Mendukung Transparansi Dan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Website Resmi Pemerintah Kabupaten Klungkung). *Citizen Charter*, 28600.

Yasinta, P. N. (2020). Collaborative Governance dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*.

Sumber Buku

Sudarmo. (2011). *Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance*. Solo: SmartMedia.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.

